

KEGIATAN TES URINE SEBAGAI UPAYA P4GN DI INSTANSI PEMERINTAH OLEH BNNP JAWA TIMUR (Studi Kasus di Kantor Bea Cukai Surabaya)

Ista Inassa

Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga Surabaya
Email: inassa11ista@gmail.com

ABSTRACT

Togetherness in realizing healthy Indonesia free of narcotics is a global action carried out to improve public health. Narcotics stands for Narcotics, Psychotropic and Other Addictive Materials. Other terms are drugs (narcotics, psychotropics, and addictive substances). Drug abuse if not handled seriously from an early age, is feared to damage the future of the nation's next generation. This has invited the attention of the Indonesian government by making the implementing regulation of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely the restructuring of the National Narcotics Agency institutions in the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Circulation (P4GN). Preventive measures in drug abuse can be done by detecting the content of drugs in the body. Urine is one of the samples most often used to examine the types of drug substances because it is considered the most accurate with the target, namely students, employees and the general public so that many urine test activities that use rapid tests. This research is a kind of qualitative descriptive and observational research. The study was conducted by collecting secondary data, observation, question and answer and participation. Based on the results of the analysis and discussion, it can be concluded that the report on the results of the activities of the section on prevention and community empowerment of the BNN East Java Province in 2017 shows the total activities carried out, namely times. In 2018, until August 2018 it is known that 220 activities have been carried out 220 times. The P2M field has implemented a full health promotion strategy, namely by using advocacy methods, fostering atmosphere and empowerment. Based on the results of observations and interviews conducted in urine testing activities at the Customs Office in Surabaya the urine test examination stage is in accordance with the technical guidelines in the field of community participation.

Keywords: *Narcotics, BNN, Prevention, Health Promotion*

ABSTRAK

Kebersamaan dalam mewujudkan Indonesia sehat bebas Narkoba merupakan aksi global yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya. Istilah lainnya adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Penyalahgunaan narkoba jika tidak ditangani secara serius sejak dini, dikhawatirkan merusak masa depan generasi penerus bangsa. Hal tersebut telah mengundang perhatian pemerintah RI dengan membuat aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu restrukturisasi kelembagaan Badan

Narkotika Nasional dalam melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Upaya preventif dalam penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan deteksi kandungan narkoba dalam tubuh. Urin merupakan salah satu sampel yang paling sering digunakan untuk memeriksa jenis zat narkoba karena dianggap paling akurat dengan sasaran yaitu pelajar, pegawai maupun masyarakat umum sehingga banyak kegiatan tes urin yang menggunakan rapid tes. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dan observasional kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, observasi, tanya jawab dan partisipasi. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Laporan hasil kegiatan seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 menunjukkan total kegiatan yang dilakukan yaitu kali. Tahun 2018, hingga bulan Agustus 2018 diketahui kegiatan yang telah dilakukan 220 sebanyak 191 kali. Bidang P2M telah menerapkan strategi promosi kesehatan secara purna yaitu dengan menggunakan metode advokasi, bina suasana dan pemberdayaan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dalam kegiatan tes urin di Kantor Bea Cukai Surabaya tahap kegiatan pemeriksaan tes urin telah sesuai dengan petunjuk teknis bidang peran serta masyarakat.

Kata kunci: Narkoba, BNN, Pencegahan, Promosi Kesehatan

PENDAHULUAN

Definisi sehat menurut WHO adalah keadaan sejahtera, sempurna dari fisik, mental, dan sosial yang tidak terbatas hanya pada bebas dari penyakit dan kelemahan saja. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur untuk mencapai kesejahteraan yang sesuai dengan salah satu cita-cita bangsa Indonesia dan untuk menunjang kesehatan masyarakat dengan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Upaya tersebut hendaknya dilakukan dengan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa dan pembangunan nasional. Masyarakat saat ini telah banyak menginginkan mendapatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan yang baik, lengkap, mudah dan terjangkau

Menurut WHO, promosi kesehatan merupakan proses peningkatan kontrol dalam kesehatan.¹ Menurut ilmu kesehatan masyarakat, promosi kesehatan memiliki arti sebagai bagian dari pencegahan masalah kesehatan. Salah satunya berkaitan dengan pencegahan masalah kesehatan adalah program pencegahan penyalahgunaan narkoba pada Perwali Surabaya nomor 65 tahun 2016. Berdasarkan strategi promosi kesehatan sesuai deklarasi *Ottawa Charterada* lima diantaranya kebijakan publik berwawasan kesehatan, lingkungan yang mendukung terhadap kesehatan, peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan keterampilan terhadap anggota masyarakat, reorientasi pelayanan kesehatan.²

Kebersamaan dalam mewujudkan Indonesia sehat bebas Narkoba merupakan aksi global yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Narkoba adalah

singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya. Istilah lainnya adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Semua bentuk narkotika benda-benda atau zat kimia yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengonsumsinya.³ Peningkatan jumlah penyalahgunaan dan pengedar yang tertangkap serta adanya pabrik narkoba yang dibangun di Indonesia merupakan menjadi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap yang semakin marak dan kompleks. Untuk itu penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan suatu upaya yang terpadu dan komprehensif yaitu meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi. Beberapa faktor seperti letak geografi Indonesia, ekonomi, kemudahan memperoleh obat-obatan terlarang, keluarga dan masyarakat, serta faktor fisik dari individu yang menyalahgunakan merupakan penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba.⁴

Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunaannya saja, namun juga masa depan bangsa dan Negara. Dampak tersebut mengancam berbagai lapisan masyarakat tanpa membedakan sastra sosial, ekonomi, usia, maupun tingkat pendidikan.⁵

Efek buruk akan timbul baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat akibat adanya narkoba. Ketergantungan, gangguan kesehatan, gangguan mental, menghancurkan

masa depan sendiri, menjadi perilaku kejahatan, serta kematian merupakan efek buruk yang terjadi pada individu. Kemudian efek yang akan timbul pada keluarga yaitu menjadi aib, gangguan keharmonisan pada keluarga, serta dapat menghilangkan harapan dari keluarga. Dengan melakukan penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan kerugian pula pada bangsa dan negara, seperti merusak generasi muda serta merusak ketahanan nasional.⁶ Kekhawatiran akan timbul, seperti rusaknya generasi masa depan dan penerus bangsa, apabila penyalahgunaan narkoba tidak ditangani dengan serius sejak dini. Sehingga perlu adanya upaya yang harus dilakukan secara terus menerus untuk mengontrol dan mencegah peredaran gelap narkoba agar Negara Indonesia bisa terlepas dari bahaya narkoba tersebut

Asia merupakan salah satu benua yang menjadi sasaran terbesar bagi peredaran narkoba. Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki angka penyalahgunaan narkoba terbesar di Asia Tenggara selain Thailand dengan peningkatan jumlah yang signifikan sejak tahun 2000. Sebagai Negara berkembang, Indonesia memiliki pola penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang berbeda dengan di beberapa Negara Eropa dan Amerika (www.bnnp.jatim.com). Hal tersebut telah mengundang perhatian pemerintah RI dengan membuat aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu restrukturisasi kelembagaan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Jawa Timur sebagai provinsi yang padat akan penduduknya dengan total 37.070.731 juta jiwa, dengan luas wilayah 47.922 km². Berdasarkan informasi dari Ditjen Permasalahannya, saat ini jumlah narapidana terkait kasus narkoba 49.896 jiwa, terdiri dari produsen sebesar 952 jiwa, Bandar 5.430 jiwa, pengedar sebesar 22.092 jiwa, penadah 2.490 jiwa, dan pengguna 18.905 jiwa.

Tugas pokok BNN adalah mengkoordinasikan instansi terkait dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaannya di Bidang penyediaan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hasil penelitian prevalensi pecandu dan penyalahguna narkoba yang dilakukan BNN bersama Puslitkes UI tahun 2017 berjumlah 1,77% dari 3.376.115. Namun demikian, jumlah pecandu yang terakses layanan rehabilitasi masih sangat sedikit dibanding para pecandu yang tidak terakses perawatan dan pemulihan. Mereka bertebaran ke semua lapisan masyarakat, baik lingkungan keluarga, kerja, pendidikan dan lingkungan masyarakat, dalam kondisi mengidap adiksi narkoba dan berpotensi mengganggu ketertiban dan memicu masalah lingkungannya.⁷ Proyeksi pada tahun 2017 yaitu 1,77% (3,376 orang), pada tahun

2018 1,74% (3,356 orang), tahun 2019 1,73% (3,361 orang), tahun 2020 1,71% (3,365 orang), 2021 1,70% (3,368 orang), dan tahun 2020 1,70 (3,396 orang) (Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN RI).

Dalam rangka menyelamatkan generasi muda sebagai investasi yang tidak ternilai, perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan melakukan beberapa upaya misalkan dengan ikut serta dalam mensosialisasikan program BNN Kota Surabaya melakukan kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di berbagai dimenasi lingkungan yaitu masyarakat, pendidikan, lingkungan kerja pemerintah dan swasta.

Menurut keputusan Pemerintah melalui instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) menginstruksikan kepada seluruh komponen masyarakat dan pihak lainnya dapat berpartisipasi dalam upaya P4GN. Dalam melakukan upaya P4GN dilakukan diseminasi informasi dalam bentuk sosialisasi maupun insert konten serta pelatihan yang dilakukan di masyarakat oleh bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) yang merupakan salah satu dari 3 bidang lainnya; yaitu Bagian Umum, Pemberantasan, dan Rehabilitasi, di BNN Kota Surabaya agar

nantinya terbentuk suatu relawan atau kawan BNN disetiap kelurahan yang ada di Kota Surabaya agar mampu meminimalkan dan mencegah penggunaan narkoba yang ada di lingkungan masyarakat. Program yang dilakukan oleh P2M tersebut diharapkan nantinya dapat menurunkan jumlah pecandu maupun penyalahguna narkoba pada masyarakat dikarenakan masyarakat sudah memiliki pengetahuan dan wawasan mengenai narkotika.

Upaya preventif dalam penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan deteksi kandungan narkoba dalam tubuh. Urin merupakan salah satu sampel yang paling sering digunakan untuk memeriksa jenis zat narkoba karena dianggap paling akurat dengan sasaran yaitu pelajar, pegawai maupun masyarakat umum sehingga banyak kegiatan tes urin yang menggunakan rapid tes. Akan tetapi beberapa sampel lain juga bisa digunakan untuk memeriksa jenis zat narkoba yang ada dalam tubuh manusia, seperti saliva, keringat, darah dan rambut.⁸

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (disingkat DJBC atau bea cukai) merupakan nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Kantor yang bergerak di bidang kepabeanan dan cukai ini berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka impor (PDRI) meliputi (PPN Impor,

PPh Pasal 22, PPnBM) dan cukai. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) ke dalam kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk didalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh DJBC. Selain itu, tugas dan fungsi DJBC adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Seiring perkembangan zaman, DJBC bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu. Luasnya ranah bidang bea cukai menjadikan pegawai bea cukai berpotensi terpapar dengan zat-zat terlarang.

Tes urin merupakan alat deteksi sederhana untuk mengetahui kandungan paparan narkoba dalam tubuh yaitu dengan menggunakan rapid tes yang dimasukkan kedalam tabung/ pot berisi urin untuk mengetahui enam parameter zat narkoba yaitu marijuana, morfin, amphetamine, methamphetamine, ekstasi dan kokain. Kegiatan tes urin yang dilakukan oleh BNNP Jawa Timur di Kantor Bea Cukai merupakan upaya preventif sebagai deteksi paparan narkoba di instansi pemerintah sehingga diharapkan tidak ada penyalahgunaan narkoba oleh para pegawai instansi pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kegiatan tes

urin sebagai upaya preventif P4GN deteksi paparan penyalahgunaan narkoba di lingkungan instansi pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan observasional. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, observasi, tanya jawab dan partisipasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung tentang aktivitas kerja para staf di BNN Kota Surabaya. Tanya jawab dilakukan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai kegiatan, tugas, dan kinerja para staf. Partisipasi dengan ikut serta dalam suatu pelaksanaan kegiatan serta melakukan analisis pada kegiatan yang diikuti. Kegiatan ini dilaksanakan di 2 bidang yang terdapat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur secara bergantian, yaitu bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dan Rehabilitasi. Kegiatan dilaksanakan selama 5 minggu, terhitung tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan 7 September 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) merupakan bagian dari tugas dan fungsi BNN Kota Surabaya dan menjadi naungan tanggung jawab dari Kepala BNN. Kegiatan dari pelaksanaan P2M itu juga untuk memberdayakan masyarakat dalam

mengikis peredaran gelap narkoba melalui pendekatan hukum penawaran dan permintaan.

Laporan Hasil Kegiatan P4GN di bidang P2M

1. Seksi Pencegahan

Hasil kegiatan dalam seksi pencegahan direkap menjadi laporan mingguan yang setiap tahun akan dilaporkan menjadi laporan tahunan sebagai kegiatan P4GN di bidang pencegahan

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan P4GN oleh BNNP Jawa Timur Tahun 2017

Kegiatan	Pelaksanaan (kali)	Peserta
Penyuluhan	176	91.501
Tes Urin	44	2.974
Total	220	94.475

Dari tabel di atas diketahui bahwa kegiatan yang telah dilakukan P2M dalam upaya P4GN berupa penyuluhan dan tes urin sejumlah 220 kali dengan jumlah peserta yang turut dalam kegiatan tersebut sebanyak 94.475 orang.

Pada tahun 2018 berbagai kegiatan yang telah dilakukan di bidang pencegahan meliputi Insert konten, Car free day, Kampanye Stop narkoba, Koordinasi, Pelatihan Penggiat, Pemetaan, Pengembangan kapasitas, Rapat Kerja, Sosialisasi, Talk show, Tes urin, Workshop, dan sebagainya.

Tabel 2. Pelaksanaan Kegiatan P4GN oleh BNNP Jawa Timur Bulan Januari-Agustus Tahun 2018

Kegiatan	Jumlah
DIPA	
Advokasi	28

Kegiatan	Jumlah
Bina Suasana	7
Pemberdayaan	14
<i>NON DIPA</i>	
Advokasi	-
Bina Suasana	31
Pemberdayaan	111
Total	191

Dari kegiatan tersebut dapat diketahui kegiatan promosi kesehatan P4GM meliputi advokasi (koordinasi, pemetaan, rapat kerja, rapat sinergitas), bina suasana (*car free day*, kampanye, *talk show*, *workshop*, deklarasi, FGD, harlah, jalan sehat, kuliah umum, MoU, pasar rakyat) dan pemberdayaan (diseminfo, *insert* konten, pelatihan penggiat, pengembangan kapasitas, sosialisai, tes urin, kaderisasi, pelatihan motivator, pembentukan relawan, pemilihan duta, pengembangan kapasitas, seminar).

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan dalam seksi pencegahan dibagi menjadi:

a. Pemberdayaan

Pemberdayaan dilakukan dalam empat lingkungan, yaitu Pemerintah, Masyarakat, Swasta dan Pendidikan. Output dari kegiatan ini adalah penggiat anti narkoba yang diharapkan mampu menjadi volunteer dan bisa mengajak teman-teman lain untuk turut serta dalam upaya P4GN.

b. Pemberdayaan Alternatif

Pemberdayaan alternatif ditujukan untuk kawasan yang rawan narkoba, seperti

lingkungan yang dikelilingi oleh kurir, pengguna, pemasok dan sebagainya yang berhubungan dengan narkoba. Tahun 2017, Bangkalan terpilih sebagai lokasi yang diberdayakan. Pemberdayaan alternatif berisi pelatihan selama 2 hari oleh pelatih, dalam hal ini kemampuan yang diberikan adalah service dan cuci AC.

Tabel 3. Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Alternatif di Bangkalan oleh BNNP Jawa Timur Tahun 2017

Tahun	2017	2018
Jumlah	10	15

Di tahun 2018 akan direncanakan kelanjutan pelatihan pemberdayaan alternatif di wilayah Bangkalan sebanyak 15 orang. Ini merupakan kelanjutan dari pelatihan tahun 2017. Dilihat dari jumlah peserta pelatihan di tahun 2017 yang hanya 10 orang dan meningkat menjadi 15 orang di tahun 2018 berarti bahwa kesadaran masyarakat untuk beralih ke kehidupan yang lebih baik semakin nampak.

Upaya pemberdayaan dan saling kerja sama di empat ranah yaitu pemerintah, masyarakat, swasta dan pendidikan diharapkan mampu menekan kejadian penyalahgunaan narkoba di semua elemen lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jawa Timur yang bekerja sama dengan instansi lain memberikan sebuah dampak positif dalam memberikan lingkungan yang bebas narkoba.

Dalam strategi promosi kesehatan dikatakan telah purna jika terdiri dari advokasi, bina suasana, dan pemberdayaan.^{9,10} Kegiatan yang dilakukan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pencegahan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah memenuhi kriteria tersebut. Dari hasil laporan yang didapat dari bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat diketahui bahwa dalam melakukan promosi kesehatan selain dengan melakukan upaya penyuluhan dan diseminasi oleh seksi cegah, terdapat pula pemberdayaan dan area pemberdayaan alternatif oleh seksi pemberdayaan masyarakat. Sebagai upaya keberlanjutan dari pencegahan penyalahgunaan narkoba BNNP Jawa Timur telah melakukan pemberdayaan di area yang rawan akan peredaran narkoba dengan membekali keterampilan service dan cuci AC, melakukan bina suasana dengan terus mengevaluasi kegiatan pemberdayaan dan memantau kabar terkini via ponsel juga evaluasi yang dilakukan di akhir pelatihan. Adi menyatakan bahwa pada program pemberdayaan masyarakat terdapat kelompok yang memandang pemberdayaan sebagai suatu program ataupun proses.¹¹

Pemberdayaan masyarakat juga perlu adanya kerjasama antara berbagai pihak, seperti yang disebutkan oleh Adi, sebagai tiga pilar utama lembaga pelayanan masyarakat yaitu lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, dan

sector swasta.¹² Untuk lebih mendukung kegiatan tersebut, BNNP juga berupaya melakukan advokasi pada pemerintah agar membuat peraturan tentang P4GN di wilayah tersebut. Selain itu, sebagai upaya keberlanjutan kegiatan pemberdayaan, BNNP sedang berupaya melakukan MoU dengan BLK Bangkalan agar peserta yang telah diberi keterampilan dapat berfungsi dan kembali ke lingkungannya.

Laporan Hasil Kegiatan P4GN di bidang P2M

Kegiatan tes urin di Kantor Bea Cukai Surabaya diawali dengan adanya komunikasi antara Kantor Bea Cukai dengan BNN Provinsi Jawa Timur. yang meminta bantuan dalam melaksanakan kegiatan tes urin. Kantor Bea Cukai memfasilitasi kegiatan tes urin dengan menyiapkan lokasi dan alat yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. BNNP Jatim sebagai *provider* kemudian datang sesuai jadwal yang telah disepakati. Kegiatan tes urin diawali dengan sosialisasi mengenai narkoba oleh BNNP. Kemudian secara berkelompok peserta keluar untuk melakukan tes urin.

a. Metode yang digunakan dalam pemaparan masalah narkoba di Kantor Bea Cukai Surabaya, antara lain:

1. Ceramah singkat

Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak BNN Provinsi Jawa Timur khususnya pada seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dengan memaparkan

tentang jenis narkoba dan bahaya bagi tubuh serta efek baik jangka pendek dan jangka panjang. Diperkenalkan pula beberapa narkoba jenis baru seperti flakka dan tembakau gorilla.

2. Pemutaran video

Pemutaran beberapa video tentang reaksi dari pemakaian narkoba ditayangkan disela-sela penyuluhan. Harapan dari adanya pemutaran video ini adalah memampukan peserta untuk melihat dampak yang lebih nyata dari penyalahgunaan narkoba. Dengan pemahaman yang baik diharapkan mampu meningkatkan minat peserta dalam penyebaran informasi mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkoba yang berada di lingkungan tempat tinggalnya. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo, disimpulkan bahwa pemberian materi penyuluhan dengan menggunakan metode ceramah dan di dukung dengan adanya media interaktif menunjukkan hasil yang efektif dalam pembelajaran.¹³

b. Hasil Kegiatan Tes Urin

Kegiatan tes urin di Kantor Bea Cukai dilakukan sebagai agenda rutin oleh instansi tersebut. Kegiatan tes urin dilaksanakan selama dua hari. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan 6 parameter untuk mengetahui kandungan narkoba dalam tubuh, 6 parameter tersebut adalah AMP (Amphetamine), METH (Methamphetamine/ sabu), THC (Marijuana), COC (Cocain), OPIAT/ MOP (Opiates), BZO (Benzodiazepin). Hasil pemeriksaan berupa presumtif positif atau negatif, dinyatakan

positif jika terbaca 1 strip dan negatif jika tampak 2 garis yang jelas di masing-masing parameter. Tahap pelaksanaannya meliputi:

1. Petugas administrasi mempersiapkan absensi peserta dan cup/ pot urin dengan kondifikasi sesuai absensi.
2. Petugas administrasi memberikan cup/ pot urin dengan kondifikasi pot kepada peserta dan menandatangani form pengambilan.
3. Pengambilan urin diawasi oleh petugas dengan volume urin minimum 25 ml untuk menghindari adanya upaya pencampuran dengan air atau menukar dengan urin orang lain.
4. Sampel urin peserta diserahkan kepada petugas dengan menandatangani form pengembalian dan menuliskan apabila terdapat obat-obatan yang dikonsumsi.
5. Petugas melakukan analisis. Sampel urin kemudian diuji menggunakan rapid test yang memiliki 6 parameter uji (AMP, METH, THC, COC, OPIAT/ MOP, BZO). Hasil pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dapat menunjukkan hasil positif atau negatif.

Pemeriksaan yang dilakukan pada hari ke II, diketahui dari 121 peserta yang mengikuti tes urin didapatkan 2 peserta yang positif pada BZO, hal ini disebabkan karena peserta sedang mengonsumsi obat pereda nyeri. Kemudian pihak provider membuat berita acara dan diinformasikan kepada instansi terkait untuk tindakan lanjutan.

Kesesuaian Kegiatan Tes Urin sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kantor Bea Cukai Surabaya dengan Teori Pencegahan Leave & Clark

Sasaran dari promosi kesehatan adalah masyarakat, oleh karena masyarakat berada dalam berbagai status atau kondisi maka promosi kesehatan harus bersifat komprehensif. Sasaran dari kegiatan tes urin di Kantor Bea Cukai adalah sasaran primer yaitu individu sehat. Sehingga pencegahan yang diterapkan berada pada level 1 dan 2 yaitu *helath promotion/ disease promotion* dan *specific protection*.

Leave dan Clark mengemukakan tentang 5 level pencegahan,^{14,15} yang terdiri dari:

1. Promosi Kesehatan (*Health Promotion*)

Promosi kesehatan merupakan tahap awal dari *5 level of prevention* (tingkat pencegahan penyakit). Promosi kesehatan merupakan tahapan awal dalam pencegahan penyakit yaitu melalui proses dalam memberikan informasi kesehatan. Informasi kesehatan tersebut diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tersebut mau dan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti melakukan konseling, penyuluhan, konsultasi, dan lainnya.

Kegiatan promosi kesehatan di BNNP Jawa Timur telah dilakukan dengan memanfaatkan strategi yang purna yaitu

melakukan advokasi kepada beberapa daerah untuk segera mengesahkan aturan tentang P4GN, terutama di daerah rawan narkoba. Bina suasana dilakukan dengan terlibat dalam kegiatan seperti kampanye anti narkoba dalam event-event yang menarik perhatian banyak orang seperti *car free day*, *talk show*, *workshop*, deklarasi, harlah, jalan sehat, kuliah umum dan sebagainya. Pemberdayaan diberikan baik melalui sosialisasi maupun tes urin. Pelatihan dalam kegiatan pemberdayaan alternatif dirasa kurang, yaitu dilakukan hanya 2 kali pelatihan dan belum adanya indikator yang nyata untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan seperti tingkat kemampuan peserta pemberdayaan, apakah telah mampu atau ada yang kompetensi yang sulit untuk dipelajari sehingga dapat dievaluasi pelatihan mana yang perlu ditingkatkan atau beberapa materi yang perlu di ulang. Pendampingan juga belum dilakukan sampai peserta mampu atau berdaya untuk kembali di lingkungan masyarakat sehingga seringkali kemampuan peserta selesai saat pelatihan telah usai. Namun, hal ini telah diupayakan oleh BNNP Jawa Timur dengan melakukan MoU dengan BLK setempat.

2. Perlindungan Khusus (*Specific Protection*)

Perlindungan yang diberikan kepada individu maupun suatu kelompok yang berisiko terkena suatu penyakit tertentu merupakan tahapan yang dimaksud dalam

perlindungan khusus ini. Dengan adanya perlindungan tersebut diharapkan agar kelompok beresiko tersebut dapat bertahan dari serangan penyakit yang mengincarinya. Sehingga perlindungan khusus ini biasa disebut dengan kekebalan buatan, contohnya yaitu imunisasi.

Dalam kasus narkoba tidak ada perlindungan khusus yang dapat menghindarkan diri dari pengaruh narkoba, kecuali penguatan dari berbagai lingkungan seperti di lingkungan masyarakat, pendidikan, lingkungan kerja dan tekad kuat dari individu itu sendiri. Narkoba yang digunakan tidak hanya berdampak buruk bagi penampilan pecandu karena terdapat penyakit lain yang kerap mengintai para pecandu narkoba. Untuk narkoba suntik, karena penggunaan jarum yang bersamaan berpotensi terkena penyakit hepatitis B dan HIV. Penyakit lain yang mungkin turut bagi pecandu narkoba adalah gangguan hati/liver dan ginjal, gangguan paru dan pernafasan, infeksi menular seksual hingga gangguan jiwa. Dengan menginformasikan dampak narkoba terhadap kesehatan diharapkan akan meningkatkan tekad seseorang dalam menghindarkan diri dari narkoba sehingga tercipta lingkungan yang bersih narkoba. Salah satu upaya BNNP Jawa Timur dalam memberikan perlindungan dari bahaya narkoba yaitu dengan membentuk kegiatan yang berbasis

masyarakat seperti pelatihan penggiat, pengembangan kapasitas, kaderisasi, pelatihan motivator, pembentukan relawan, pemilihan duta dan pengembangan kapasitas.

3. Diagnosis dini dan Pengobatan Segera (*Early Diagnosis and Prompt Treatment*)

Ketika seseorang telah jatuh sakit, langkah pertama yang dilakukan yaitu diagnosis dini dan pengobatan yang tepat dan cepat. Target sasaran dari diagnosis dini ini yaitu orang-orang yang telah jatuh sakit, agar penyakit yang dideritanya dapat segera teridentifikasi dan dengan cepat dilakukan pengobatan yang tepat. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah penyakit yang sudah ada pada orang tidak menjadi lebih parah. Seseorang dapat sembuh dari penyakitnya bukan hanya karena faktor dari jenis obat yang diminum dan kemampuan dari tenaga medis, akan tetapi fapat dipengaruhi pula dari kapan pengobatan tersebut diberikan. Semakin cepat pengobatan tersebut diberikan, semakin besar pula kemungkinan untuk cepat sembuh. Dengan dilakukannya diagnosis dini dan pengobatan secara cepat dan tepat, dapat mencegah kecacatan pada orang yang mungkin akan timbul apabila penyakit tersebut dibiarkan tanpa dilakukan tindakan kuratif.

Kegiatan tes urin yang dilakukan oleh BNNP Jawa Timur merupakan satu bentuk dari kegiatan deteksi dini penyalahgunaan

narkoba. Hal yang diharapkan dari kegiatan ini adalah mengetahui keberadaan narkoba dalam tubuh kemudian segera diberikan penanganan/ rehabilitasi sebelum jatuh sampai tahap candu. Indikator keberhasilan dari kegiatan tes urin dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tes urin secara mandiri.

Hasil presumtif positif yang didapat dari pemeriksaan tes dicatat dan dilaporkan pada instansi terkait, kemudian dilanjutkan dengan uji konfirmasi di laboratorium. Hal ini sesuai dengan praktik tes urin yang dilakukan oleh BNNP Jawa Timur. Dua hasil tes urin yang positif ditulis dalam berita acara dan diserahkan kepada instansi dengan catatan bahwa 2 peserta ini sedang dalam kondisi mengonsumsi obat-obatan pereda nyeri sehingga berpotensi mengakibatkan positif palsu dalam tes urin yang dilakukan.

4. Pembatasan Cacat (*Disability Limitation*)

Timbulnya kecacatan dapat dicegah dengan pengobatan yang lebih sempurna, sebagai contoh dengan cara meminum obat yang sudah diberikan oleh dokter sampai obat tersebut habis. Karena ditakutkan akan timbul suatu kecacatan akibat pengobatan yang dilakukan penderita tidak sempurna. Adapun pembatasan kecacatan terkesan membiarkan penyakit menyerang dan membuat cacat si penderita, baru kemudian dilakukan tindakan.

Tiga pilihan bagi pecandu adalah rehabilitasi, bui, mati. Kegiatan tes urin di instansi pemerintah diharapkan meningkatkan rasa mawas bagi para pekerja sehingga dapat menjalankan tugas dengan purna.

5. Rehabilitasi (*Rehabilitation*)

Tahap yang terakhir yaitu dengan rehabilitasi yang bersifat pemulihan. Rehabilitasi ini ditujukan kepada masyarakat yang dalam masa penyembuhan, sehingga diharapkan menjadi pulih dari sakit dan dapat melaksanakan aktifitas kembali dengan normal. Terdapat minimal empat poin yang perlu diperhatikan, yakni pemulihan secara mental, fisik, status sosial dalam masyarakat, dan estetis.

Narkoba merupakan obat yang menyerang di saraf. Seorang pecandu narkoba, hanya dapat pulih secara fisik. Artinya bahwa suatu saat jika ada trigger/ stimuli maka dia akan sangat besar kemungkinan untuk kambuh kembali atau relaps.

Kesesuaian Kegiatan P2M Berdasarkan Konsep Piagam Ottawa Charter dalam Promosi Kesehatan

Piagam Ottawa Charter adalah piagam kesepakatan yang dihasilkan pada Konferensi Internasional Promosi Kesehatan di Ottawa, Canada tahun 1986, telah membawa perubahan dalam pengertian dan praktek "*health promotion*" atau promosi kesehatan. Piagam ini mendefinisikan Promosi Kesehatan sebagai

proses yang memungkinkan individu mengendalikan dan memperbaiki kesehatannya. Untuk mencapai kesehatan jasmani, rohani, dan sosial yang sempurna, seseorang atau kelompok harus mampu mengidentifikasi dan mewujudkan aspirasi, mampu memenuhi kebutuhan, mampu mengubah atau beradaptasi dengan lingkungan. Berdasarkan konferensi tersebut, piagam Ottawa Charter (1986) menghasilkan 5 sarana aksi, yaitu:

1. Kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan (*Health Public Policy*).

Pembuat keputusan atau penentu kebijakan merupakan target atau sasaran dari kegiatan ini. Setiap kebijakan pembangunan yang akan dibuat dalam bidang apapun harus mempertimbangkan bagi masyarakat.

Pengembangan jaringan kemitraan dan suasana ini merupakan tujuan dari kegiatan tersebut untuk mendukung kesehatan di masyarakat. Kegiatan yang ditujukan kepada pemimpin organisasi masyarakat, serta pengelola tempat-tempat umum, dan diharapkan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan non fisik yang mendukung atau kondusif terhadap kesehatan masyarakat. Selain melakukan sosialisasi mengenai bahaya narkoba, BNNP Jawa Timur juga sudah menjalin kemitraan dengan instansi-instansi yang lain agar mendukung masyarakat untuk terhindar dari penyalahgunaan narkoba

2. Mengembangkan jaringan kemitraan dan lingkungan yang mendukung (*create partnership and supportive environment*).

Pengembangan jaringan kemitraan dan suasana yang mendukung terhadap kesehatan merupakan tujuan dari kegiatan ini. Serta pemimpin organisasi masyarakat serta pengelola tempat-tempat umum merupakan target dilakukannya kegiatan ini dan diharapkan untuk memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, baik lingkungan fisik maupun non fisik yang mendukung atau kondusif terhadap kesehatan masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab Bersama antara pemberi dan penerima pelayanan. Orientasi pelayanan diarahkan dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek (melibatkan masyarakat dalam pelayanan kesehatan) yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatannya sendiri. Tidak hanya petugas kesehatan yang sebagai *provider*, namun masyarakat sendiri juga harus ikut andil dalam mencegah adanya penyalahgunaan narkoba agar Indonesia menjadi bebas dari narkoba.

3. Reorientasi pelayanan kesehatan (*reorient health service*).

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merupakan tanggung jawab bersama antara pemberi dan penerima pelayanan, orientasi pelayanan diarahkan dengan

menempatkan masyarakat sebagai subjek yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatannya sendiri. Hal tersebut berarti pelayanan lebih diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat.

Derajat kesehatan masyarakat akan terwujud secara efektif, jika unsur-unsur yang terdapat di masyarakat bergerak bersama. Memperkuat kegiatan masyarakat berarti memberikan bantuan terhadap kegiatan yang sudah berjalan di masyarakat, sehingga dapat lebih berkembang. Kegiatan sosialisasi mengenai bahaya narkoba yang dilakukan oleh BNNP Jawa Timur dapat bermanfaat bagi masyarakat serta meningkatkan derajat kesehatannya. Dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat semakin peduli akan lingkungan sekitar dan bersama-sama melakukan pola hidup sehat untuk menjadikan Indonesia bersih dari narkoba.

4. Meningkatkan keterampilan individu (*increase personal skills*).

Kesehatan masyarakat adalah kesehatan yang terdiri atas kelompok, keluarga, dan individu. Terwujudnya kesehatan di masyarakat apabila kesehatan pada kelompok, keluarga, dan individu terwujud. Sehingga, peningkatan keterampilan pada individu maupun pada anggota masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat memelihara serta meningkatkan kualitas kesehatannya.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh BNN akan berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat akan bahayanya narkoba jika sudah masuk ke tubuh maupun lingkungan sekitar. Melalui keterampilan tersebut diharapkan masyarakat ikut andil serta berpartisipasi dalam mencegah penyalahgunaan dan penyebaran narkoba.

5. Memperkuat kegiatan masyarakat (*strengthen community action*).

Dalam mewujudkan suatu derajat kesehatan masyarakat yang secara efektif jika unsur-unsur yang terdapat di masyarakat dilakukan secara bersama-sama. Dengan diperkuatnya kegiatan dalam masyarakat sama halnya dengan membantu agar kegiatan yang sudah berjalan di masyarakat semakin berkembang. Selain itu juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berimprovisasi, yaitu melakukan kegiatan dan berperan serta dalam pembangunan kesehatan. Peran serta masyarakat sangat penting untuk melestarikan berbagai upaya. Masyarakat harus menjadi objek dalam promosi kesehatan dan pengambilan keputusan. Akses pendidikan dan informasi sangat penting untuk mendapatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

BNN melaksanakan kegiatan-kegiatan agar masyarakat juga berperan serta dalam pembangunan masyarakat. Dengan keikut-

sertaan BNN dalam kegiatan masyarakat akan memperkuat hubungan masyarakat sekitar lingkungannya. Peran serta masyarakat sangat penting dalam hal tercapainya suatu tujuan kebijakan, peran masyarakat dikaitkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2014. Seperti yang disampaikan oleh Darmawan terkait masyarakat yang mandiri apabila mereka mampu mengenali masalah yang ada pada mereka ataupun lingkungan sekitar serta berbagai faktor yang mempengaruhi masalah tersebut.¹⁶

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Laporan hasil kegiatan seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 menunjukkan total kegiatan yang dilakukan yaitu kali. Tahun 2018, hingga bulan Agustus 2018 diketahui kegiatan yang telah dilakukan 220 sebanyak 191 kali. Kegiatan seksi pencegahan terdiri dari advokasi dan diseminasi. Sedangkan seksi cegah terdapat pemberdayaan dan pemberdayaan alternatif.

Kegiatan tes urin di Kantor Bea Cukai Surabaya diawali sosialisasi dengan metode ceramah singkat dan pemutaran video yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jawa Timur, kemudian dilanjutkan pemeriksaan urin menggunakan rapid tes dengan 6 parameter

untuk mengetahui kandungan narkoba didalam tubuh. Hasil dari kegiatan tes urin didapatkan 2 peserta yang positif pada BZO, hal ini disebabkan karena peserta sedang mengonsumsi obat pereda nyeri.

Bidang P2M telah menerapkan strategi promosi kesehatan secara purna yaitu dengan menggunakan metode advokasi, bina suasana dan pemberdayaan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dalam kegiatan tes urin di Kantor Bea Cukai Surabaya tahap kegiatan pemeriksaan tes urin telah sesuai dengan petunjuk teknis bidang peran serta masyarakat.

REFERENSI

1. Narkotika Nasional. Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 2010.
2. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Kholik. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba Pada Klien Rehabilitasi Narkoba di Poli NAPZA RSJ Sambang Lihum. Jurnal Skala Kesehatan. 2014. Vol 5 No.1.
4. Direktorat Peran Serta Masyarakat Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional. Petunjuk Teknis Peran Serta Masyarakat Di Bidang P4GN. 2012.
5. Badan Narkotika Nasional. BNN Republik Indonesia. 2017. Dapat diakses pada <http://www.bnn.go.id/> sitasi tanggal 16 September 2018.
6. Medicalogy. Macam-Macam Alat Tes Narkoba. 2017. Dapat diakses pada <https://www.medicalogy.com> sitasi tanggal 17 September 2018.
7. WHO. Ottawa Charter 1st International Conference on Health Promotion. 1986.

dalam <http://www.who.int> sitasi tanggal 16 September 2018

8. Notoatmodjo, S. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005.
9. Adi, I.R. Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI. 2002.
10. Prasetyo, T. Efektivitas Metode Ceramah Plus dengan Media Interaktif dalam Pembelajaran di SMA Kesatrian 2 Semarang. Fakultas Bahasa dan Seni: UNS. Semarang. 2013.
11. Leavel and Clark. Public Health. Yale Uneversity. 1958.
12. Darmawan. Waspada! Gejala Penyakit Mematikan. Jakarta Selatan: PT. Suka Buku. 2012.